



► PENGELOLAAN SAMPAH

Pemkot Tunda Pembangunan TPST di Piyungan

UMBULHARJO- Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menunda pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) di Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Bantul. Penundaan dilakukan menyusul adanya protes dari warga di sekitar lokasi.

Affi Annisa Karin
affi@harianjogja.com

Penjabat Wali Kota Jogja, Singgih Raharjo mengatakan, rencana pembangunan tempat pengolahan sampah menjadi produk *Refuse Derived Fuel* di Piyungan ditunda untuk sementara waktu. Padahal, seharusnya pekan ini telah memasuki masa kontrak dengan vendor. "Karena waktunya yang sangat mepet karena pertengahan April kami harus mengelola sampah secara mandiri, maka kami akan mengoptimalkan TPST yang sudah ada terlebih dulu," ujar Singgih saat ditemui, Jumat (8/3).

Optimalisasi TPST yang dimaksud yakni penambahan kapasitas TPS3R Nitikan dan TPS3R Karangmiri. Selain itu, Pemkot juga menata ulang kedua lokasi agar pengolahan sampah bisa berjalan efektif dan efisien. "Ditunda dulu [pembangunan TPST di Piyungan]. Selain optimalisasi di dua TPS3R yang sudah ada,

- Singgih memastikan rencana pembangunan tempat pengolahan sampah menjadi produk RDF di Piyungan ditunda untuk sementara waktu.
- Penolakan muncul lantaran adanya persepsi bahwa pembangunan TPST masih sama dengan TPA yang ada saat ini.

kami juga mempercepat kerja sama dengan pihak swasta," katanya.

Singgih memastikan jajarannya telah menjalin komunikasi dengan warga Sitimulyo, mulai dari tingkat RT, RW, hingga kalurahan setelah mendapat izin penggunaan lahan dari Pemda DIY. Saat itu, Singgih mengakui adanya gejala penolakan lantaran persepsi yang muncul terkait dengan rencana pembangunan TPST yakni pembangunan layaknya tempat pembuangan akhir (TPA) seperti yang ada saat ini. "Padahal kami akan mengolah sampah sampai habis, tidak menambah tumpukan sampah di TPA Piyungan. Di TPST yang bakal dibangun, kami mengolah sampah sampai habis dengan menghasilkan RDF yang bisa dijual. Tidak ada tumpukan sampah maupun residu," katanya.

Dijelaskan Singgih, RDF merupakan bahan bakar pembuat semen. Dia juga memastikan sudah ada pihak *offtaker* yang akan memanfaatkan produk RDF. "Misalnya kami mengolah 40 ton sampah per hari, maka semuanya langsung selesai hari itu juga. Jika



Singgih Raharjo

ada residu, jumlahnya sangat sedikit, dan kami usahakan nol, sehingga tidak menambah volume sampah yang ada di Piyungan," ungkapnya.

Saat ditanya, sampai kapan penundaan dilakukan, Singgih tak menjawab secara pasti.

"Lihat saja nanti, tunggu perkembangan," katanya.

Sebelumnya yakni pada Kamis (7/3), puluhan warga Dusun Banyakan 3, Kalurahan Sitimulyo, Piyungan, menggelar aksi unjukrasa menolak pendirian fasilitas pengolahan sampah berteknologi *refuse derived fuel* (RDF) milik Pemkot Jogja di TPST Piyungan.

Kepala Dusun Banyakan 3, Lilik Purwoko mengakui warga tidak mengetahui rencana pembangunan tempat pengolahan sampah milik Pemkot Jogja di TPST Piyungan. "Selama ini tidak ada sosialisasi, tahu-tahu ada undangan peletakan batu pertama pengolahan sampah RDF milik Pemkot Jogja," katanya. Warga, menurut Lilik, mengaku kaget dan keberatan dengan rencana tersebut. Hal ini tak lepas dari dampak pencemaran yang cukup lama dirasakan warga.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005